



PENDIDIKAN INKLUSI DI SUMATERA UTARA : KURANGNYA TENAGA PENDIDIKAN DAN FASILITAS UNTUK SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

INCLUSIVE EDUCATION IN NORTH SUMATERA: LACK OF TEACHING PERSONNEL AND FACILITIES FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS

Putri Firmawindy Turnip¹, Fitri Handayani Chaniago², Shafira Rahma Dina Sinaga³,
Amanda Olivia Munthe⁴, Ernes Susanti Tarigan⁵, Chrysanta Monica Ginting⁶,
Lili Tansliova⁷

¹⁻⁷Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara

Email : putriturnip152@gmail.com¹, fh0518732@gmail.com², shafirasinaga1204@gmail.com³,
amandaoliviamunthe@gmail.com⁴, ernestarigan03@gmail.com⁵, chrysantaginting@gmail.com⁶,
lilitans@unimed.ac.id⁷

Article Info

Article history :

Received : 18-03-2025

Revised : 20-03-2025

Accepted : 22-03-2025

Published: 24-03-2025

Abstract

Inclusive education aims to provide equal opportunities for all children, including children with special needs (ABK), to be able to learn in the same educational environment as other children. However, the implementation of inclusive education in North Sumatra still faces many challenges, such as the lack of competent educators and limited facilities that are friendly to ABK. This study aims to analyze the impact of limited educators and facilities on the quality of inclusive education in North Sumatra and explore solutions that can be applied. The research method used is a qualitative study with a descriptive approach through data analysis from various secondary sources, such as government reports, previous research, and interviews with stakeholders in the field of inclusive education. The results of the study indicate that the lack of teacher training, limited school infrastructure, and low public awareness are the main factors inhibiting inclusive education in North Sumatra. Therefore, ongoing training is needed for educators, improvement of ABK-friendly school facilities, and awareness campaigns to eliminate the stigma against children with special needs.

Keywords: *Inclusive education, children with special needs, educators*

Abstrak

Pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), agar dapat belajar di lingkungan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Namun, implementasi pendidikan inklusi di Sumatera Utara masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dan terbatasnya fasilitas yang ramah bagi ABK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas terhadap kualitas pendidikan inklusi di Sumatera Utara serta mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis data dari berbagai sumber sekunder, seperti laporan pemerintah, penelitian sebelumnya, serta wawancara dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan guru, keterbatasan infrastruktur sekolah, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama penghambat pendidikan inklusi di Sumatera Utara. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik, peningkatan fasilitas sekolah yang ramah ABK, serta kampanye kesadaran untuk menghilangkan stigma terhadap anak berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: *Pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus, tenaga pendidik*



PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk mendapatkan pendidikan yang setara di sekolah reguler. Sistem ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi dalam pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, maupun sosialnya, mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pembelajaran.

Namun, di Sumatera Utara, implementasi pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Banyak sekolah yang masih belum memiliki guru dengan keahlian dalam pendidikan inklusi, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal. Selain itu, masih minimnya pelatihan bagi guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus menyebabkan kesulitan dalam menerapkan metode pengajaran yang sesuai.

Selain permasalahan tenaga pendidik, fasilitas pendukung bagi siswa berkebutuhan khusus juga masih sangat terbatas. Banyak sekolah di Sumatera Utara yang belum dilengkapi dengan infrastruktur yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus, seperti jalur akses bagi siswa dengan disabilitas fisik, ruang kelas yang ramah sensorik bagi anak dengan autisme, serta alat bantu belajar yang memadai. Akibatnya, siswa berkebutuhan khusus sering kali mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran dengan baik.

Kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak sekolah mengenai pentingnya pendidikan inklusi juga menjadi faktor penghambat. Masih terdapat stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus, baik dari pihak sekolah, orang tua, maupun siswa lainnya. Hal ini menyebabkan anak-anak berkebutuhan khusus seringkali merasa tidak diterima di lingkungan sekolah reguler, sehingga menghambat perkembangan akademik dan sosial mereka.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali sistem pendidikan inklusi di Sumatera Utara serta mencari solusi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pendidikan inklusi dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusi di Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti laporan pemerintah, jurnal akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas pendidikan inklusi dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti tenaga pendidik, orang tua siswa ABK, serta perwakilan dari dinas pendidikan, dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai kondisi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola utama dalam tantangan pendidikan inklusi, mengkaji dampaknya terhadap siswa berkebutuhan khusus, serta mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi di Sumatera Utara.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas terhadap kualitas pendidikan inklusi di Sumatera Utara

Dampak Kurangnya Tenaga Pendidik Anak Berkebutuhan Khusus di Sumatera Utara

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah sebuah aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara. ABK membutuhkan pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, mengingat adanya kebutuhan spesial dalam aspek kognitif, sosial, dan emosional mereka. Sayangnya, di Sumatera Utara, salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah kekurangan tenaga pendidik yang memiliki keterampilan khusus dalam mengajar anak-anak dengan berbagai macam kebutuhan ini. Hal ini menyebabkan banyak dampak negatif, baik bagi anak-anak tersebut maupun bagi sistem pendidikan secara keseluruhan.

Dampak Terhadap Perkembangan Akademis

Kurangnya tenaga pendidik yang terlatih untuk menangani ABK secara langsung berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh mereka. Anak-anak berkebutuhan khusus sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan pengajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Misalnya, anak dengan autisme memerlukan pengajaran yang lebih sabar dan berbasis pada rutinitas yang dapat membantu mereka belajar secara bertahap. Namun, tanpa adanya tenaga pendidik yang terlatih dalam bidang ini, anak-anak tersebut sering kali tertinggal dalam perkembangan akademis mereka. Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Medan, meskipun sudah berupaya memberikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, data menunjukkan bahwa lebih dari 40% dari siswa ABK di sekolah ini mengalami kesulitan dalam mengikuti kurikulum yang ada. Hal ini terjadi karena minimnya jumlah guru yang memahami teknik pengajaran yang efektif bagi ABK, seperti penggunaan metode visual atau sensorik yang dapat memfasilitasi proses belajar mereka. Sebagai akibatnya, anak-anak ini tidak bisa belajar secara maksimal dan mengalami keterlambatan dalam pencapaian akademis.

Dampak Sosial dan Psikologis Anak Berkebutuhan Khusus

Selain dampak akademis, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih juga berpengaruh pada aspek sosial dan psikologis anak berkebutuhan khusus. Anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang mengalami keterbatasan dalam komunikasi atau interaksi sosial, sering kali merasa terisolasi atau kesulitan bergaul dengan teman-teman mereka. Dalam banyak kasus, mereka mungkin merasa tidak dihargai atau tidak dipahami oleh lingkungan sekitar. Jika anak-anak ini tidak mendapatkan dukungan yang tepat dari guru yang terlatih dalam mengelola kebutuhan sosial dan emosional mereka, dampaknya dapat sangat serius. Di SLB Negeri 1 Binjai, meskipun sekolah ini berusaha untuk memberikan pendidikan yang inklusif, banyak anak yang kesulitan berinteraksi dengan teman sebayanya. Kurangnya guru yang terampil dalam memberikan pendekatan yang mendukung pengembangan keterampilan sosial anak menyebabkan banyak siswa ABK merasa terasing dan kurang percaya diri. Dampak jangka panjangnya bisa berupa peningkatan kecemasan, depresi, dan gangguan psikologis lainnya yang menghambat perkembangan pribadi mereka.



Pembelajaran yang Tidak Optimal dan Ketidaksetaraan Akses

Kekurangan tenaga pendidik yang kompeten juga menyebabkan pembelajaran yang tidak optimal bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan tanpa pendidik yang memahami hal ini, mereka sering kali diperlakukan sama dengan anak-anak lain dalam proses pembelajaran. Misalnya, seorang anak dengan tunarungu membutuhkan pendekatan pengajaran yang memfokuskan pada visualisasi dan isyarat tubuh, sementara anak dengan gangguan pemrosesan informasi memerlukan waktu lebih untuk memahami materi pelajaran. Tanpa adanya guru yang memiliki keahlian dalam menerapkan teknik-teknik khusus ini, anak-anak berkebutuhan khusus sering kali merasa frustrasi dan kurang mampu untuk mengikuti pembelajaran. Di SLB Negeri 2 Medan, misalnya, meskipun sekolah ini memiliki fasilitas dan sumber daya untuk mendukung pendidikan ABK, namun pengajaran yang tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa membuat banyak siswa yang tertinggal. Mereka tidak hanya mengalami kesulitan dalam memproses informasi, tetapi juga merasa cemas karena tidak dapat mengikuti pelajaran seperti teman-teman mereka yang tidak memiliki kebutuhan khusus.

Dampak Terhadap Sistem Pendidikan Secara Keseluruhan

Dampak dari kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dalam pendidikan ABK juga terasa pada sistem pendidikan secara keseluruhan. Meskipun pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menyediakan pendidikan inklusif bagi semua anak, kenyataannya banyak daerah, termasuk Sumatera Utara, yang belum dapat menerapkan prinsip ini dengan baik. Data dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari 20 SLB yang ada di daerah ini mengalami kekurangan guru ABK yang terlatih. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebijakan pendidikan inklusif yang ada dan realitas di lapangan. Akibatnya, banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapat kesempatan yang setara dalam pendidikan yang layak, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di dunia kerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di Sumatera Utara, kurangnya fasilitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi tantangan serius yang berdampak luas pada pendidikan dan kesejahteraan mereka. Meskipun pemerintah telah berupaya membangun sekolah-sekolah inklusi, berbagai kendala masih menghambat implementasinya, termasuk keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang memadai. Menurut Elisabeth Simanjuntak, Kabid Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, mahasiswa berkebutuhan khusus sering kali mengalami kesulitan dalam mencari tempat tinggal yang aman dan nyaman ketika mereka datang dari luar kota Medan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Meskipun ada program bantuan biaya hidup bagi mahasiswa tersebut, tantangan dalam mencari tempat kos yang layak tetap menjadi penghalang utama, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil.

Kondisi ini diperparah oleh kurangnya fasilitas yang ramah bagi ABK di sekolah-sekolah, seperti aksesibilitas fisik yang memadai, ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas sanitasi yang sesuai. Banyak sekolah belum siap untuk memberikan layanan inklusif yang optimal, seperti yang teridentifikasi oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara, yang melakukan identifikasi kapasitas satuan pendidikan untuk layanan inklusif. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa banyak sekolah tidak memiliki fasilitas fisik yang mendukung serta pelatihan



bagi guru untuk mengelola kelas inklusif dengan baik. Hal ini menyebabkan kualitas pengajaran terpengaruh oleh rendahnya jumlah guru yang memiliki pendidikan khusus dalam menangani ABK, sehingga menghambat proses pembelajaran yang efektif.

Lingkungan pendidikan yang tidak mendukung ini menciptakan kesulitan bagi ABK dalam mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kurangnya pemahaman tentang pendidikan inklusif di kalangan guru juga menjadi faktor penghambat utama; banyak guru tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Selain itu, rendahnya kualitas guru di Sumatera Utara sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan berkelanjutan dan perhatian dari pemerintah terhadap pengembangan profesionalisme mereka.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi ABK, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Program-program pelatihan bagi guru harus dilakukan secara rutin agar mereka dapat memahami dan menerapkan metode pengajaran yang sesuai untuk ABK. Jika tantangan ini tidak segera ditangani, dampak negatif dari kurangnya fasilitas akan terus berlanjut, memperlebar kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sumatera Utara. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua anak.

Solusi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tenaga pendidik dan fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus di Sumatera Utara

Kurangnya tenaga kependidikan yang terlatih untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sumatera Utara merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian mendalam, karena dampaknya sangat luas terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan anak-anak ini. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu solusi utama adalah meningkatkan jumlah guru pendamping ABK dan memberikan pelatihan yang komprehensif bagi mereka. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan khusus dalam menangani berbagai jenis kebutuhan dan kelainan yang dihadapi oleh ABK, sehingga guru dapat lebih efektif dalam mengelola kelas inklusif. Menurut referensi yang telah kami dapat, para guru menyatakan bahwa menambah jumlah guru ABK dan meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa berkebutuhan khusus.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah mengadakan program pelatihan yang dirancang khusus untuk guru-guru pendamping ABK. Program ini harus mencakup pengenalan terhadap kekhususan anak dan layanan yang tepat, penguasaan pembuatan Program Pembelajaran Individual (PPI), serta keterampilan dalam modifikasi kurikulum dan layanan. Dengan pelatihan yang tepat, guru akan mampu meningkatkan kecakapan hidup ABK dan memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan agar guru tetap up-to-date dengan metode pengajaran terbaru dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam kebutuhan siswa.

Selain peningkatan jumlah tenaga pendidik, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif juga menjadi langkah krusial. Masyarakat seringkali memiliki



stigma negatif terhadap ABK, yang dapat menghambat dukungan dan partisipasi mereka dalam pendidikan. Oleh karena itu, kampanye yang menjelaskan kemampuan dan prestasi ABK dapat membantu mengubah pandangan masyarakat dan meningkatkan penerimaan terhadap keberadaan mereka di sekolah-sekolah reguler. Dengan menunjukkan contoh-contoh keberhasilan ABK, masyarakat akan lebih memahami bahwa anak-anak ini juga memiliki potensi untuk berprestasi jika diberikan kesempatan yang sama.

Pengembangan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif juga sangat diperlukan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara harus segera mencari solusi untuk meningkatkan peran tenaga pendukung di sekolah-sekolah, termasuk menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan guru dan peningkatan fasilitas pendidikan. Hal ini mencakup penyediaan ruang kelas yang ramah bagi ABK serta aksesibilitas fisik yang memadai seperti ramp untuk kursi roda dan fasilitas sanitasi yang sesuai. Kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Implementasi sistem rolling bagi anak didik secara bergantian di ruang kelas juga bisa menjadi solusi sementara untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar. Dengan cara ini, semua siswa dapat mendapatkan perhatian yang cukup dari guru tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran. Selain itu, kolaborasi antara sekolah dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi lainnya dapat membantu dalam penyediaan sumber daya tambahan, baik dalam bentuk tenaga pengajar maupun materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK.

Akhirnya, evaluasi berkala terhadap program-program pendidikan inklusif perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. BPMP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan identifikasi kapasitas satuan pendidikan untuk mengetahui tantangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan layanan bagi ABK. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang lebih komprehensif, sehingga setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala oleh berbagai hambatan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya, diharapkan pendidikan inklusif di Sumatera Utara dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi ABK.

Menerapkan langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan bagi ABK tetapi juga akan membantu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dalam pendidikan. Dengan demikian, semua anak di Sumatera Utara memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan khusus mereka.

Kurangnya fasilitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sumatera Utara adalah tantangan serius yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk menghasilkan solusi yang efektif. Salah satu langkah utama yang harus diambil adalah meningkatkan aksesibilitas fisik di sekolah-sekolah. Ini mencakup penyediaan ramp untuk kursi roda, ruang kelas yang nyaman dan aman, serta fasilitas sanitasi yang ramah bagi ABK. Selain itu, penting untuk menyediakan fasilitas terapi khusus seperti ruang rehabilitasi dan terapi bicara. Setiap jenis kebutuhan khusus memerlukan sarana dan prasarana yang berbeda; misalnya, anak tunanetra memerlukan jalur khusus dengan blok pemandu, sementara anak dengan gangguan motorik membutuhkan pegangan di dinding atau kursi khusus untuk mendukung mobilitas mereka.



Pemerintah daerah, bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara, telah melakukan identifikasi kapasitas satuan pendidikan untuk memahami tantangan dalam penyelenggaraan layanan inklusif. Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa banyak sekolah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ABK. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan inklusif. Ini termasuk penyediaan ruang kelas fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan belajar-mengajar, ventilasi yang baik untuk kenyamanan siswa, serta peralatan medis dan fasilitas terapi bagi anak-anak dengan kondisi kesehatan tertentu.

Di samping itu, pelatihan berkelanjutan bagi guru juga menjadi solusi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi ABK. Guru harus dilatih untuk memahami kebutuhan unik setiap ABK serta mampu memodifikasi kurikulum agar sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut Dr. Aida Ginting, ahli pendidikan inklusi, guru yang kompeten adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pelatihan ini harus mencakup metode pengajaran individual, penggunaan alat bantu pembelajaran khusus, serta pendekatan psikologis untuk membantu ABK mengatasi tantangan emosional dan sosial mereka. Pelatihan semacam ini tidak hanya meningkatkan keterampilan pengajaran guru tetapi juga memberikan mereka alat yang diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih mendukung.

Kerjasama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan lembaga swasta juga sangat diperlukan untuk mendukung pengadaan fasilitas tambahan. Misalnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat membantu menyediakan buku-buku pelajaran khusus atau media pembelajaran digital yang dirancang untuk ABK. Selain itu, kampanye kesadaran publik perlu digalakkan untuk mengurangi stigma terhadap ABK dan mendorong masyarakat agar lebih mendukung pendidikan inklusif. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi ABK, akan terbuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Langkah lain yang dapat diambil adalah membangun lebih banyak Sekolah Luar Biasa (SLB) di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau. Saat ini, banyak anak berkebutuhan khusus di Sumatera Utara tidak dapat mengakses pendidikan karena jarak ke sekolah terlalu jauh atau fasilitas transportasi tidak memadai. Dengan membangun SLB baru yang mudah diakses, anak-anak ini akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan mereka. Sekolah reguler juga harus didorong untuk mengadopsi model inklusi dengan menyediakan fasilitas pendukung yang cukup.

Evaluasi berkala terhadap implementasi program-program pendidikan inklusif juga sangat penting. BPMP Sumut telah memulai langkah ini dengan melakukan observasi langsung ke sekolah-sekolah dan mengidentifikasi kendala utama dalam penyelenggaraan layanan bagi ABK. Hasil evaluasi ini harus digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan baru yang lebih efektif dan memastikan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan Masyarakat diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih inklusif.

Dengan pendekatan terpadu seperti ini melibatkan peningkatan infrastruktur fisik, pelatihan guru, kerjasama multi-pihak, pembangunan SLB baru, serta evaluasi kebijakan secara berkala diharapkan fasilitas bagi ABK di Sumatera Utara dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini tidak



hanya akan memberikan manfaat langsung kepada anak-anak berkebutuhan khusus tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Pendidikan inklusif bukan hanya sekadar sebuah kebijakan; ini adalah langkah menuju keadilan sosial dan kesempatan yang sama bagi semua anak di Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Pendidikan inklusi di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama dalam hal keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus serta minimnya fasilitas yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kurangnya tenaga pendidik yang terlatih menyebabkan proses pembelajaran bagi ABK tidak optimal, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam perkembangan akademik maupun sosial. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, seperti aksesibilitas fisik, alat bantu pembelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya, semakin memperburuk kualitas pendidikan inklusi di wilayah ini.

Dampak dari kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai tidak hanya dirasakan oleh siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga berdampak pada sistem pendidikan secara keseluruhan. Siswa ABK cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, merasa terisolasi secara sosial, dan kurang mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang secara optimal. Selain itu, masih adanya stigma di masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus menjadi penghambat dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan berbagai langkah strategis, seperti meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, menyediakan fasilitas sekolah yang ramah ABK, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat guna menghilangkan stigma terhadap pendidikan inklusi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang lebih progresif dalam mendukung pendidikan inklusi perlu diperkuat dengan alokasi anggaran yang memadai dan evaluasi berkala terhadap implementasinya di lapangan.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat luas, diharapkan pendidikan inklusi di Sumatera Utara dapat berjalan lebih baik. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak, sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. F., & Putri, K. A. (2024). Peran Pendidikan Inklusif: Strategi dan Tantangan dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Anak-Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 8(2), 109-119.
- Awanda, I., & Sari, T. M. (2024). Peran Guru dalam Pendidikan Inklusi. *Quantum Edukatif: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 1(2), 32-38.
- Kusnia, N. (2019). Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan pendidikan Inklusi di SDN Betet 1 Kediri. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1), 25.
- Manurung, RRB, Nst, I., & Musthafa, W. (2021). Peran Dinas Pendidikan Povinsi Sumatra Utara dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa Negeri Autis. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3 (2), 143-149.



- Mukti, H., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Analisis pendidikan inklusif: Kendala dan solusi dalam implementasinya. Kaganga: *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 761-777.
- Ndek, F. S., Lulu, M. J., Bate, M., & Weo, M. S. (2023). Peran fasilitas pendidikan dalam meningkatkan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 39-49.
- Rembang, D. P. K. (2016). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan. Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun, 2021.
- Setianingsih, E. S. (2017). Implementasi Pendidikan Inklusi: Manajemen Tenaga Kependidikan (Gpk). *Malih Peddas*, 7(2), 502743.
- Syahrizal, S., Suci, AE, & Khairani, E. (2022). Model Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah SLB Osakali Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan. *Pendidikan Berkelanjutan: Jurnal Sains dan Penelitian* , 3 (2), 49-61.